



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2022**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan pada 10 (sepuluh) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selama perubahan anggaran Tahun 2022, serta sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian- bagian di Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua kebijakan.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Rencana Kerja yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Martapura, Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Jr. H. Mokhamad Hilman, ST, MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19700328 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1.Latar Belakang.....	1
1.1.1. Pengertian Perubahan Renja Sekretariat Daerah.....	1
1.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah.....	2
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
I.2.Landasan Hukum.....	5
I.3.Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.....	8
1.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	8
I.4.Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	10
II.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH.....	26
III.1. Perubahan Indikator Kinerja	26
III.2. Jumlah Program dan Kegiatan.....	26
III.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	29
BAB IV PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar	11
Tabel 3.1	Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun Anggaran	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar dengan mengacu kepada Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan RKPD Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar.

Perubahan Rencana Kerja disusun menggambarkan program dan kegiatan prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan yang sedang terjadi. Jika dalam perencanaan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai baik ada tambahan atau berkurangnya kegiatan dan atau tidak sesuainya jumlah pagu, maka akan dilakukan perubahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran di tahun yang akan datang.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dimaksud menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai

dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Serta perubahan indikator sub kegiatan menyesuaikan Kepmendagri Nomor 050-5889 yang telah ditetapkan dengan Perubahan Renstra SKPD.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja (SKPD) Tahun 2022 ini:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Yang menyebabkan adanya perbedaan terkait nomenklatur Program Kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya..
2. Surat Edaran Bupati Banjar tanggal 11 Juli 2022 Nomor : RP.02.02/667/PPE-Bappedalitbang, Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2022.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Perubahan Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2022 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan sampai triwulan II, indikator kinerja *output* dan *outcome* yang kurang *relevan*, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja.

1.1.1. Pengertian Perubahan Renja Sekretariat Daerah

Perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting pada Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat Daerah tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah

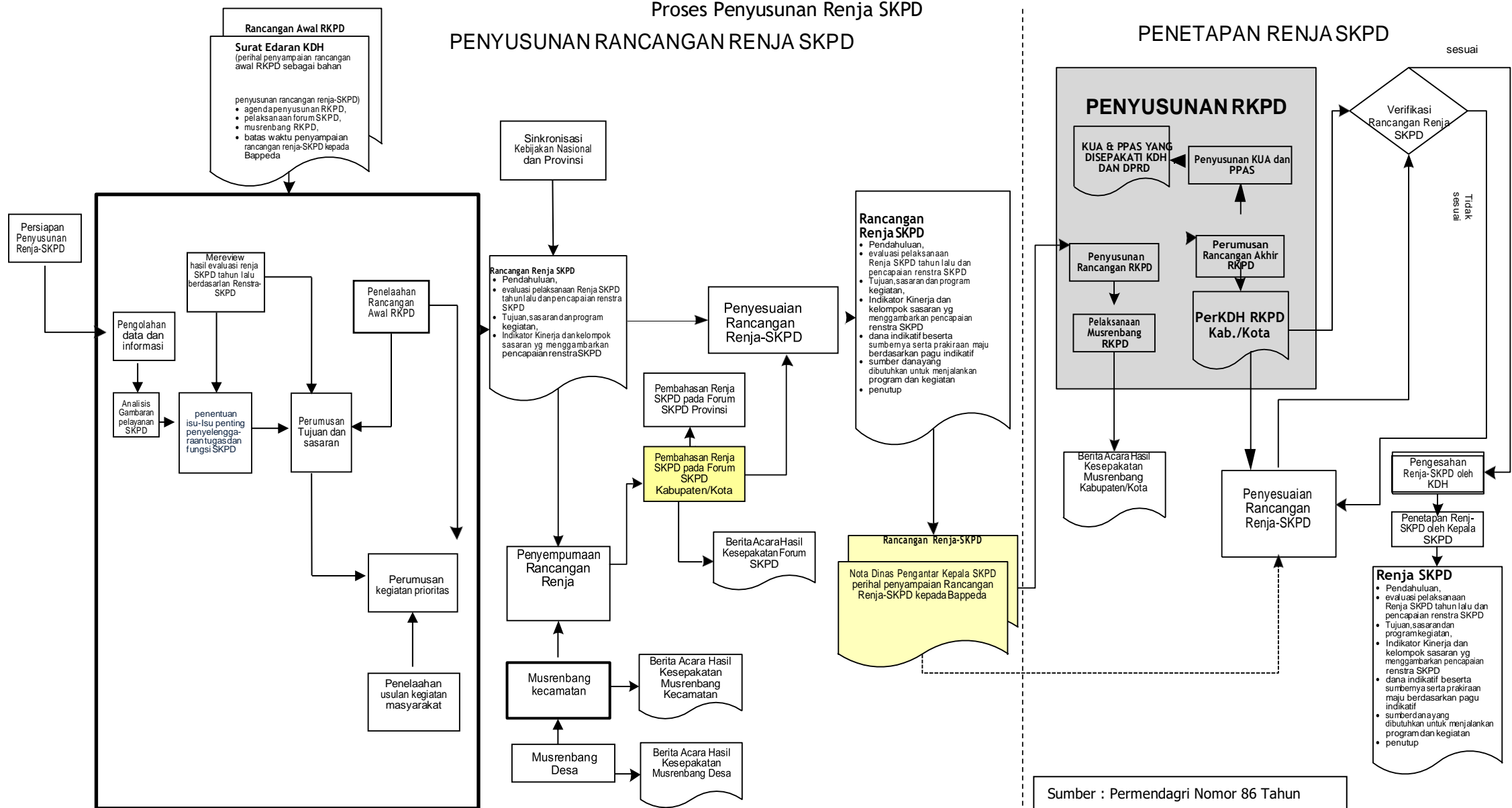
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD Perubahan, Renstra dan Renja Perubahan

Sekretariat Daerah disusun berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja;
2. Kerangka perencanaan jangka menengah;
3. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
4. Urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

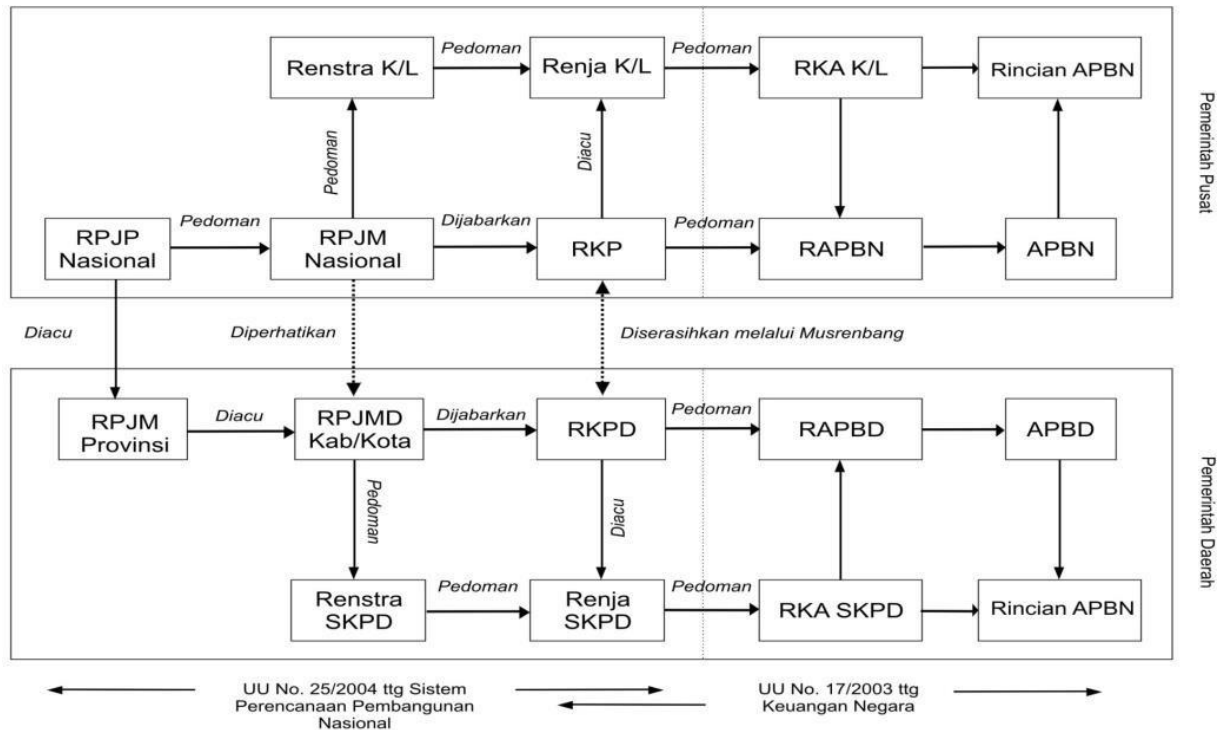
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1



Gambar 1. 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan rencana kerja, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

I.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah.
2. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

I.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah:

1. Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022;
2. Menjabarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah jangka pendek;
3. Menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
4. Menyelaraskan evaluasi kinerja tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;

I.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga terwujudnya sinergitas dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan rencana anggaran Sekretariat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Sekretariat Daerah 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2022. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- 2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- 2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kemudian memasukkan tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2022.

3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1. Perubahan Indikator Kinerja
- 3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
- 3.3. Total Kebutuhan Dana/pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3.4. Alasan dilakukan Perubahan

Disertai lampiran tabel sebagaimana hasil laporan Renja Perubahan pada SIPD

4. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

- 4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

II.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Dalam penyusunan rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi. Pada penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2022 tidak terlepas dari hasil evaluasi capaian kinerja hasil Tahun 2022 sampai dengan triwulan II, evaluasi ini dijelaskan mengenai pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. sesuai Pedoman Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2022, yaitu SE Nomor : RP.02.02/667/PPE-BappedaLitbang tanggal 11 Juli 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2022 terdapat permasalahan, berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan menunjukkan adanya kegiatan yang dananya tidak terpakai dan ada kegiatan yang kekurangan dana, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif maka dilakukan pengeseran anggaran/ penambahan dana.

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program dan 19 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Dari data yang ada diharapkan bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan tingkat realisasi >90%.

Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing–masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Sedangkan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022 performa dari masing–masing bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik karena pengukuran kinerja Sekretariat Daerah masih berjalan (sampai dengan triwulan II). Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*). Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2022

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RKPD :
Terselenggaranya Reformasi Dalam Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K			Rp	
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%		15	16
1	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	14.147.369.035	100	5.408.604.225	100	persen	7.708.543.200	25	203.318.342	25	3.747.808.118					50	3.951.126.460	150	9.359.730.685	150	66,16		
			Nilai LPPD	3.200,5	868.625.512	3.506,9	403.538.824	31.107	Nilai	8.360.368.000	0	53.886.700	0	215.874.700					0	269.761.400	3.506,9	673.300.224	110	77,51		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	14.147.369.035	100	5.408.604.225	100	persen	7.708.543.200	25	203.318.342	25	3.747.808.118					50	3.951.126.460		9.359.730.685	0	66,16	Setda	
			Nilai LPPD	3.200,5	868.625.512	3.506,9	403.538.824	31.107	Nilai	8.360.368.000	0	53.886.700	0	215.874.700					0	269.761.400	3.506,9	673.300.224	110	77,51	Setda	
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Fasilitas, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	80.034.294	100	37.239.000	100	Persen	53.080.500	25	240.000	25	37.716.000					50	37.956.000	150	75.195.000	150	93,95	Setda	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100	574.298.368	100	259.101.924	100	Persen	391.796.500	25	36.398.200	25	58.006.100					50	94.404.300	150	353.506.224	150	61,55	Setda	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = (13 / 5) * 100%	15	16											
			Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100	176.872.211	100	82.832.600	100	Persen	181.389.000	25	13.875.000	25	113.913.100					50	127.788.100	150	210.620.700	150	119,08	Setda	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	4	80.034.294	1	37.239.000	4	Dokumen	53.080.500	1	240.000	1	37.716.000					2	37.956.000	3	75.195.000	75	93,95	Setda	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	574.298.368	17	259.101.924	4	Dokumen	391.796.500	1	36.398.200	0	58.006.100					1	94.404.300	18	353.506.224	450	61,55	Setda	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	176.872.211	2	82.832.600	5	Dokumen	181.389.000	0	13.875.000	4	113.913.100					4	127.788.100	6	210.620.700	120	119,08	Setda	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	8.000.000.000	100	3.335.489.248	100	Persen	5.084.006.000	25	107.938.720	25	2.618.813.120					50	2.726.751.840	150	6.062.241.088	150	75,78	Setda	
			Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan	100	1.531.961.035	100	403.329.232	100	Persen	1.849.766.200	25	0	25	844.802.800					50	844.802.800	150	1.248.132.032	150	81,47	Setda	
			Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	100	3.100.000.000	100	1.400.734.208	100	Persen	409.906.800	25	22.777.400	25	257.062.500					50	279.839.900	150	1.680.574.108	150	54,21	Setda	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	8.000.000.000	8	3.335.489.248	4	Dokumen	5.084.006.000	1	107.938.720	4	2.618.813.120					4	2.726.751.840	12	6.062.241.088	150	75,78	Setda	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K			Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	1.531.961.035	39	403.329.232	4	Dokumen	1.849.766.200	0	0	1	844.802.800			1	844.802.800	40	1.248.132.032	133 3	81,47	Setda		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	3.100.000.000	60	1.400.734.208	4	Dokumen	409.906.800	1	22.777.400	2	257.062.500			2	279.839.900	62	1.680.574.108	155 0	54,21	Setda		
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100	548.876.400	100	81.212.400	100	Persen	91.479.400	25	17.312.500	25	15.315.200			50	32.627.700	150	113.840.100	150	20,74	Setda		
			Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Bantuan Fasilitasi Hukum	100	613.906.800	100	124.654.000	100	Persen	209.271.200	25	45.930.000	25	-			50	45.930.000	150	170.584.000	150	27,79	Setda		
			Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	352.624.800	100	63.185.137	100	Persen	64.113.600	25	9.359.722	25	11.814.498			50	21.174.220	150	84.359.357	150	23,92	Setda		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550	548.876.400	746	81.212.400	550	Dokumen	91.479.400	0	17.312.500	433	15.315.200			433	32.627.700	1179	113.840.100	214	20,74	Setda		
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	613.906.800	5	124.654.000	5	kasus	209.271.200	1	45.930.000	5	0			5	45.930.000	10	170.584.000	200	27,79	Setda		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500	352.624.800	501	63.185.137	500	Dokumen	64.113.600	0	9.359.722	375	11.814.498			375	21.174.220	876	84.359.357	175	23,92	Setda		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%		15	16
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100	37.420.639	100	24.365.300	100	Persen	25.558.800	25	3.373.500	25	6.239.500					50	9.613.000	150	33.978.300	150	90,80	Setda	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	37.420.639	1	24.365.300	1	Dokumen	25.558.800	0	3.373.500	0	6.239.500					0	9.613.000	1	33.978.300	100	90,80	Setda	
2	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.764.663.544	100	372.291.597	100	Persen	678.704.400	25	41.809.140	25	98.878.020					50	140.687.160	150	512.978.757	150	29,06949366	Setda	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	81	2.000.000.000	10	440.619.151	40	Indeks	801.360.700	0	76.308.701	0	218.052.209					0	294.360.910	10	734.980.061	12,3	36,74900305	Setda	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.764.663.544	100	372.291.597	100	Persen	678.704.400	25	41.809.140	25	98.878.020					50	140.687.160	150	512.978.757	150	29,07	Setda	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	81	2.000.000.000	10	440.619.151	40	Indeks	801.360.700	0	76.308.701	0	218.052.209					0	294.360.910	10	734.980.061	12,3	36,75	Setda	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian.	100	800.000.000	100	227.012.578	100	Persen	447.221.500	25	14.754.100	25	34.238.700					50	48.992.800	150	276.005.378	150	34,50	Setda	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	13	550.000.000	14	163.903.570	13	Dokumen	378.407.800	2	5.874.700	2	17.095.200					4	22.969.900	18	186.873.470	138	33,98	Setda	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	250.000.000	4	63.109.008	4	Laporan	68.813.700	0	8.879.400	1	17.143.500					1	26.022.900	5	89.131.908	125	35,65	Setda	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase keberhasilan Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	100	864.663.544	100	145.279.019	100	Persen	196.130.000	25	26.230.040	25	53.189.320					50	79.419.360	150	224.698.379	150	25,99	Setda	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K			Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%		15	16								
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	476.199.544	1	16.206.200	4	Dokumen	28.780.700	1	2.182.800	1	6.448.900					2	8.631.700	3	24.837.900	75	5,22	Setda	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	134.784.000	4	24.175.400	4	Laporan	30.937.900	1	1.795.000	1	10.769.200					2	12.564.200	6	36.739.600	150	27,26	Setda	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	253.680.000	4	104.897.419	2	Laporan	136.411.400	0	22.252.240	1	35.971.220					1	58.223.460	5	163.120.879	250	64,30	Setda	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	100	2.000.000.000	100	440.619.151	20	Persen	801.360.700	25	76.308.701	25	218.052.209					50	294.360.910	150	734.980.061	150	36,75	Setda	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	400.000.000,00	8	7.804.200	5	Dokumen	129.242.000	1	6.312.000	1	104.104.000					2	110.416.000	10	118.220.200	200	29,56	Setda	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	1.000.000.000,00	54	385.001.251	5	Dokumen	540.083.700	1	68.046.701	1	112.763.209					2	180.809.910	56	565.811.161	1120	56,58	Setda	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	105	600.000.000,00	54	47.813.700	68	orang	132.035.000	10	1.950.000	4	1.185.000					14	3.135.000	68	50.948.700	64,8	8,49	Setda	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100	100.000.000			100	Persen	35.352.900	25	825.000	25	11.450.000					50	12.275.000	50	12.275.000	50	12,28	Setda	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Perangkat Daerah Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp
				5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12				14 = (13 / 5) * 100%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	45.000.000	2	11.856.000	2	Dokumen	10.693.900	0	825.000	0	225.000					0	1.050.000	2	12.906.000	100	28,68	Setda	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	96	55.000.000	2	35.660.208	96	Dokumen	24.659.000	0	0	47	11.225.000					47	11.225.000	49	46.885.208	51	85,25	Setda	
3	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		100	56.547.849.814	100	27.444.269.900	100	Persen	35.476.209.352	25	6.301.254.034	25	9.079.653.213					50	15.380.907.247	150	42.825.177.147	150	75,73	Setda	
		Nilai SAKIP		80,05	1.791.148.754	68,97	720.583.052	70	nilai	1.196.694.700	0	122.672.860	0	74.088.360		-	-		0	196.761.220		917.344.272	0		Setda	
		Nilai IKM Kab. Banjar		88,31		82,44		84	nilai		0		0						0				0		Setda	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		100	498.726.802	75	292.431.747	80	nilai	269.143.900	0	55.597.040	74,81	69.658.240		-	-		74,8	125.255.280		417.687.027	0	83,75	Setda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100	56.547.849.814	100	27.444.269.900	100	Persen	35.476.209.352	25	6.301.254.034	25	9.079.653.213					50	15.380.907.247	150	42.825.177.147	150	75,73	Setda	
		Nilai SAKIP		80,05	1.791.148.754	68,97	720.583.052	70	nilai	1.196.694.700	0	122.672.860	0	74.088.360		-	-		0	196.761.220	68,97		86,2		Setda	
		Nilai IKM Kab. Banjar		88,31		82,44		84	nilai		0		0						0		82,44		93,4		Setda	
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		100	42.100.000	75		80	nilai				74,81						74,8				0	0,00	Setda	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien	100	498.726.802	100	292.431.747	100	Persen	269.143.900	25	55.597.040	25	69.658.240					50	125.255.280	150	417.687.027	150	83,75	Setda	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Peringkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K			Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = (13 / 5) * 100%	15	16										
			Persentase Bagian yang berkinerja baik	100		100		100	Persen		25		25					50		150		150		Setda	
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel	100		100		100	Persen		25		25					50		150		150		Setda	
			Nilai Sakip Setda	82,5		82,27		81,5	Nilai		0		0					0		82,27		99,7		Setda	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	334.942.802	8	177.100.125	14	Dokumen	152.967.200	1	28.490.080	5	38.172.080				6	66.662.160	14	243.762.285	117	72,78	Setda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	121.684.000	4	68.218.022	7	Laporan	81.651.700	3	22.569.160	1	23.463.160				4	46.032.320	8	114.250.342	114	93,89	Setda	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	42.100.000	4	47.113.600	21	Laporan	34.525.000	5	4.537.800	8	8.023.000				13	12.560.800	17	59.674.400	58,6	141,74	Setda	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100	20.810.806.250	100	13.391.830.590	100	persen	16.929.346.662	0	3.368.306.482	0	4.350.760.232				0	7.719.066.714	100	21.110.897.304	100	101,44	Setda	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	20.663.606.250	120	13.308.588.237	117	orang/bulan	16.776.802.662	117	3.335.766.482	117	4.314.400.192				117	7.650.166.674	237	20.958.754.911	203	101,43	Setda	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	147.200.000	32	83.242.353	12	Dokumen	152.544.000	1	32.540.000	4	36.360.040				5	68.900.040	37	152.142.393	308	103,36	Setda	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100	500.000.000	100	-	100	Persen	317.972.000	25	35.428.399	25	63.702.307				50	99.130.706	150	99.130.706	150	19,83	Setda	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = (13 / 5) * 100%	15	16											
			Persentase jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	144.572.400	100	16.022.000	100	Persen		25		25					50	0	150	16.022.000	150	11,08	Setda		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	144.572.400	80	16.022.000	80	orang	17.972.000	40	8.860.000	0	0				40	8.860.000	120	24.882.000	150	17,21	Setda		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	500.000.000	0	-	25	orang	300.000.000	19	26.568.399	0	63.702.307				19	90.270.706	19	90.270.706	76	18,05	Setda		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	6.306.649.161	100	2.791.948.769	100	Persen	3.023.564.334	0	623.431.775	0	567.818.966				0	1.191.250.741	100	3.983.199.510	100	63,16	Setda		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	54.663.390	12	33.415.200	6	Paket	33.942.000	2	4.344.000	2	6.086.000				4	10.430.000	16	43.845.200	267	80,21	Setda		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28	718.165.061	12	1.319.119.600	14	Paket	715.800.600	4	604.237.775	9	95.986.700				13	700.224.475	25	2.019.344.075	89,3	281,18	Setda		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	33.820.710	12	13.000.000	4	Laporan	21.000.000	1	4.200.000	0	0				1	4.200.000	13	17.200.000	325	50,86	Setda		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	5.500.000.000	12	1.426.413.969	2	Laporan	2.252.821.734	0	10.650.000	1	465.746.266				1	476.396.266	13	1.902.810.235	650	34,60	Setda		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = (13 / 5) * 100%	15	16											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100	6.413.703.105	100	1.459.723.200	100	Persen	3.432.683.000	25	62.970.000	25	1.134.990.000			50	1.197.960.000	150	2.657.683.200	150	41,44	Setda			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	2.338.943.763	2	980.000.000	1	Unit	701.150.000	0	0	1	665.900.000			1	665.900.000	3	1.645.900.000	300	70,37	Setda			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	3.750.000.000	0	-	3	Unit	2.404.602.000	0	15.110.000	1	468.490.000			1	483.600.000	1	483.600.000	33,3	12,90	Setda			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	324.759.342	12	479.723.200	4	Paket	326.931.000	1	47.860.000	2	600.000			3	48.460.000	15	528.183.200	375	162,64	Setda			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	100	7.803.542.604	100	2.860.486.123	100	Persen	3.382.716.400	0	714.786.631	0	808.625.229			0	1.523.411.860	100	4.383.897.983	100	56,18	Setda			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	150.000.000	12	41.089.800	2	laporan	43.040.000	0	2.250.000	1	24.610.000			1	26.860.000	13	67.949.800	650	45,30	Setda			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.908.196.668	12	1.001.644.275	12	Laporan	1.107.126.500	1	260.142.081	5	245.451.849			6	505.593.930	18	1.507.238.205	150	78,99	Setda			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	333.778.198	12	139.055.000	2	Laporan	207.250.000	0	17.200.000	1	2.000.000			1	19.200.000	13	158.255.000	650	47,41	Setda			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = (13 / 5) * 100%	15	16										
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 5.411.567.738	12 1.678.697.048	4 Laporan	2.025.299.900	1 435.194.550	1 536.563.380		2 971.757.930	14 2.650.454.978	108 48,98	Setda											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 5.041.170.087	100 3.585.845.453	100 Persen	3.491.112.000	25 495.659.296	25 900.690.192		50 1.396.349.488	150 4.982.194.941	150 98,83	Setda											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 1.130.578.020	4 858.867.746	38 Unit	848.930.000	4 122.972.714	22 202.304.892		26 325.277.606	30 1.184.145.352	78,9 104,74	Setda											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 2.578.507.036	115 745.061.328	121 Unit	996.400.000	10 145.130.632	58 315.931.100		68 461.061.732	183 1.206.123.060	151 46,78	Setda											
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 80.525.500	12 50.082.700	16 Unit	40.000.000	2 20.414.000	4 3.880.000		6 24.294.000	18 74.376.700	113 92,36	Setda											
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 169.103.550	12 1.272.611.675	6 Unit	878.662.000	0 43.337.000	2 212.800.200		2 256.137.200	14 1.528.748.875	233 904,03	Setda											
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 571.731.050	12 331.483.720	6 Unit	410.000.000	0 83.250.200	3 90.077.500		3 173.327.700	15 504.811.420	250 88,30	Setda											

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%		15	16
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250	510.724.931	12	327.738.284	250	Unit	317.120.000	20	80.554.750	91	75.696.500					111	156.251.250	123	483.989.534	49,2	94,77	Setda	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100	275.000.000	100	167.508.584	100	Persen	170.474.556	25	35.677.653	25	47.612.963					50	83.290.616	150	250.799.200	150	91,20	Setda	
			Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	149.294.277	100	88.850.000	100	Persen	108.475.000	25	99.900.000	25	-					50	99.900.000	150	188.750.000	150	126,43	Setda	
			Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	144.945.900	100	12.315.993	100	Persen	105.000.000	25	9.938.859	25	41.746.460					50	51.685.319	150	64.001.312	150	44,16	Setda	
			Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	600.000.000	100	600.000.000	100	Persen	600.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000					50	300.000.000	150	900.000.000	150	150,00	Setda	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	275.000.000	12	167.508.584	24	orang/bulan	170.474.556	6	35.677.653	6	47.612.963					12	83.290.616	24	250.799.200	100	91,20	Setda	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	149.294.277	14	88.850.000	9	Paket	108.475.000	9	99.900.000	0	0					9	99.900.000	23	188.750.000	256	126,43	Setda	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K			Rp	
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%		15	16
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	144.945.900	12	12.315.993	6	orang	105.000.000	1	9.938.859	5	41.746.460					6	51.685.319	18	64.001.312	300	44,16	Setda	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	600.000.000	12	600.000.000	24	orang/bulan	600.000.000	2	150.000.000	4	150.000.000					6	300.000.000	18	900.000.000	300	150,00	Setda	
		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	100	3.041.178.858	100	829.443.955	100	Persen	907.944.300	25	146.427.264	25	214.513.812					50	360.941.076	150	1.190.385.031	150	39,14	Setda	
			Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai ketentuan	100	581.950.702	100	217.003.938	100	Persen	351.438.000	25	36.925.481	25	66.431.915					50	103.357.396	150	320.361.334	150	55,05	Setda	
			Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan	100	974.366.925	100	431.717.713	100	Persen	658.722.000	25	149.917.441	25	95.152.123					50	245.069.564	150	676.787.277	150	69,46	Setda	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7	974.366.925	12	431.717.713	7	Paket	658.722.000	1	149.917.441	6	95.152.123					7	245.069.564	19	676.787.277	271	69,46	Setda	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	581.950.702	12	217.003.938	6	Paket	351.438.000	1	36.925.481	5	66.431.915					6	103.357.396	18	320.361.334	300	55,05	Setda	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	3.041.178.858	12	829.443.955	17	Paket	907.944.300	2	146.427.264	15	214.513.812					17	360.941.076	29	1.190.385.031	171	39,14	Setda	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K			Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%		15	16								
		Penataan Organisasi	Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik	1,3	1.791.148.754	1,3	720.583.052	1,3	Skor/nilai	1.196.694.700	0	122.672.860	0	74.088.360					0	196.761.220	1,3	917.344.272	100	51,22	Setda	
			Persentase pengelolaan tatalaksana	100		100		100	Persen		25	25	25					50		150	150	150		Setda		
			Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	100		100		100	Persen		25	25	25					50		150	150	150		Setda		
			Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	100		100		100	Persen		25	25	25					50		150	150	150		Setda		
			Persentase PD SAKIP bernilai Baik	100		100		100	Persen		25	25	25					50		150	150	150		Setda		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	204.102.860	2	68.223.100	9	Dokumen	142.020.100	0	17.425.000	4	7.025.000				4	24.450.000	6	92.673.100	66,7	45,41	Setda		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	276.187.237	2	132.059.952	6	Laporan	185.670.400	2	10.666.500	0	2.958.600				2	13.625.100	4	145.685.052	66,7	52,75	Setda		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7	1.310.858.657	5	520.300.000	7	Dokumen	869.004.200	2	94.581.360	2	64.104.760				4	158.686.120	9	678.986.120	129	51,80	Setda		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	100	540.264.613	100	209.750.685	100	Persen	244.554.000	25	72.629.920	25	132.769.840				50	205.399.760	150	415.150.445	150	76,84	Setda		
			Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan	100	667.562.105	100	193.682.687	100	Persen	222.344.100	25	65.904.800	25	54.353.400				50	120.258.200	150	313.940.887	150	47,03	Setda		
			Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan	100	2.552.842.827	100	588.140.210	100	Persen	1.529.863.000	25	233.350.033	25	450.485.774				50	683.835.807	150	1.271.976.017	150	49,83	Setda		

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022, yang disajikan pada tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, realisasi program/kegiatan berjalan sesuai target yang direncanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II, realisasi semua program/kegiatan berjalan sesuai target yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Pada realisasi triwulan 2 ini, tidak ada program /kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Untuk program/kegiatan faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tidak ditemukan. Sedangkan untuk sasaran karena indikator dalam bentuk persentase, maka realisasi belum maksimal dikarenakan karena kebanyakan realisasi direncanakan direalisasikan pada triwulan IV, sehingga pada capaian triwulan II ini untuk sasaran masih belum sesuai target.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD yaitu :
 - Tidak ada Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
6. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :
 - Menyesuaikan anggaran belanja yang tidak perlu dan tidak berhubungan dengan indikator kinerja;
 - Memangkas dan memaksimalkan anggaran belanja yang tersedia dan lebih memprioritaskan belanja yang dianggap mendesak;
 - Memfokuskan belanja dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD dan RPJMD;
 - Memperhatikan isu strategis pada urusan yang diampu pada tahun 2022.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

III.1. Perubahan Indikator Kinerja

Penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun berakhirnya renstra disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dalam penyusunan rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi. Pada penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2022 kali ini, perubahan indikator kinerja yang dilakukan adalah pada level sub kegiatan. Indikator Kinerja menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan, memfasilitasi dan sinkronisasi dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Tujuan Rencana Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terselenggaranya Reformasi Dalam Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja.

III.2. Jumlah Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk Tahun 2022 sebanyak 3 Program, 19 kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 3. Pengadaan Mebel
- e). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g). Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h). Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

- 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
 - i). Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Sub Kegiatan :
 - 1. Fasilitasi Keprotokolan
 - 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
 - j). Penataan Organisasi
 - Sub Kegiatan :
 - 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - k). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan
- Kegiatan :
- a). Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Sub Kegiatan :
 - 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - b). Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - Sub Kegiatan :
 - 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
 - c). Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Sub Kegiatan :
 - 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - d). Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Sub Kegiatan :
 - 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - 3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- 3) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- Kegiatan :

a). Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan :

1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b). Fasilitasi Kerjasama Daerah

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

c). Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

d). Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Fasilitasi Bantuan Hukum
3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

III.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Belanja Langsung yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp. 48.821.066.052,- (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam puluh enam ribu lima puluh dua rupiah). Tabel rumusan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut (Tabel 3.1)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB	
						Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.			
1	2					3	4	5	6	7	8	9= (8-7)	10	11	
4	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	14 Dokumen	Rp. 152.967.200	Rp. 137.404.300	(15.562.900)	Belanja Honorarium narasumber dialihkan ke perjalanan dinas	Pkeu
4	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 persen 100 persen	4 Laporan	Rp. 81.651.700	Rp. 81.651.700	0		Pkeu
4	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Bagian yang menyampaikan laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase ketersediaan data dukung evaluasi Persentase ketersediaan data dukung IKKI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen 100 persen 100 persen	29 Laporan	Rp. 34.525.000	Rp. 34.525.000	0		Pkeu
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	100 Persen	100 Persen	Rp. 16.929.346.662	Rp. 16.950.581.562	21.234.900		Pkeu
4	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji ASN tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen 100 persen	117 orang/bulan	Rp.16.776.802.662	Rp.16.784.302.662	7.500.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pkeu
4	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Konsultasi mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Pnatausahaan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 persen 100 persen	12 Dokumen	Rp. 152.544.000	Rp. 166.278.900	13.734.900	Penambahan dana untuk makan minum dan belanja ATK	Pkeu

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
							Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani Persentase produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani Persentase produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	Rp. 317.972.000	Rp. 242.972.000	(75.000.000)		Hukum
4	01	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase telaksananya sosialisasi produk hukum daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	80 orang	Rp. 17.972.000	Rp. 17.972.000	0		Hukum
4	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitas Bimbingan Teknis yang terlaksana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	20 orang	Rp. 300.000.000	Rp. 225.000.000	(75.000.000)	Dana disesuaikan dengan kebutuhan	
4	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	100 persen	100 persen	Rp. 3.023.564.334	Rp. 5.175.887.474	2.152.323.140		Umum
4	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	6 paket	Rp. 33.942.000	Rp. 33.942.000	0		Umum
4	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terealisasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	28 paket	Rp. 715.800.600	Rp.2.564.629.600	1.848.829.000	Penyesuaian dengan gedung Mahligai yang sudah dilakukan rehab Pemenuhan TV untu Mahligai dan Perwakilan Jakarta Pemenuhan TV untu Perwakilan Jakarta Masih kurangnya sarana peralatan kanto khususnya untuk lapto	Umum

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
		Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Penyediaan Kunjungan Tamu yang terlaksana	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 persen	4 Laporan	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000	0		Umum
4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	2 Laporan	Rp. 2.252.821.734	Rp. 2.556.315.874	303.494.140	Anggaran Makan dan Minum untuk Coffe Moming masih kurang	Umum
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	Rp. 3.432.683.000	Rp. 3.046.683.000	(386.000.000)	Perjalanan Dinas Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi sekaligus survey ke lapangan	Umum
4 01 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai ketentuan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 Persen	1 Unit	Rp. 701.150.000	Rp. 701.150.000	0		Umum
4 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang sesuai ketentuan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 Persen	5 Unit	Rp. 2.404.602.000	Rp. 1.953.202.000	(451.400.000)	Untuk Kendaraan Operasional Setda	Umum
4 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan mebel yang sesuai ketentuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Persen	7 Paket	Rp. 326.931.000	Rp. 392.331.000	65.400.000	Pergantian kursi Pimpinan di Aula Barakat Interior Gedung Baru PBJ	Umum
4 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	Rp. 3.382.716.400	Rp. 3.332.758.060	(49.958.340)		Umum

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
							Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan Persentase pelayanan administrasi surat menyurat yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen 100 persen	2 Laporan	Rp. 43.040.000	Rp. 43.040.000	0		Umum
4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	12 Laporan	Rp. 1.107.126.500	Rp. 1.057.168.160	(49.958.340)		Umum
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	2 Laporan	Rp. 207.250.000	Rp. 207.250.000	0		Umum
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	4 Laporan	Rp. 2.025.299.900	Rp. 2.025.299.900	0		Umum
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	Rp. 3.491.112.000	Rp. 4.158.632.000	667.520.000		Umum
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai ketentuan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 persen	38 unit	Rp. 848.930.000	Rp.1.012.250.000	163.320.000	Anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas masih kurang Anggaran untuk pemeliharaan mobil dinas/jabatan masih kurang dikarenakan kenaikan harga BBM, suku cadang dan jasa service	Umum

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
							Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang sesuai ketentuan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	120 Unit	Rp. 996.400.000	Rp. 1.163.400.000	167.000.000	Anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas masih kurang Anggaran untuk pemeliharaan mobil operasional masih kurang dikarenakan kenaikan harga BBM, suku cadang dan jasa service	Umum
4	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang sesuai ketentuan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	20 Unit	Rp. 40.000.000	Rp. 50.000.000	10.000.000	Anggaran untuk pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya masih kurang	Umum
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	6 Unit	Rp. 878.662.000	Rp. 1.134.862.000	256.200.000	Masih adanya pemeliharaan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan rehab ruangan Penyesuaian dengan gedung Mahligai yang sudah dilakukan rehab Penyesuaian dengan gedung Mahligai yang sudah dilakukan rehab	Umum
4	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	6 Unit	Rp. 410.000.000	Rp. 435.000.000	25.000.000		Umum

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
							Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	264 Unit	Rp. 317.120.000	Rp. 363.120.000	46.000.000	Bertambahnya aset peralatan kantor berupa printer/pc/laptop/notebook sehingga harus menambah anggaran pemeliharaan	Umum
4	01	01	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Fasilitas Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 983.949.556	Rp. 1.029.049.556	45.100.000		Pkeu
4	01	01	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran dan Penatausahaan Penyediaan Gaji KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	24 orang/bulan	Rp. 170.474.556	Rp. 170.574.556	100.000		Pkeu
4	01	01	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100 persen	9 Paket	Rp. 108.475.000	Rp.108.475.000	0		Umum

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
							Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4	01	01	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	7 Orang	Rp. 105.000.000	Rp. 150.000.000	45.000.000	Anggaran untuk pemeliharaan kesehatan masih kurang	Umum
4	01	01	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	24 orang/bulan	Rp. 600.000.000	Rp.600.000.000	0		Umum
4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 1.918.104.300	Rp. 1.737.404.700	(180.699.600)		Umum
4	01	01	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100 persen	7 Paket	Rp. 658.722.000	Rp. 525.980.000	(132.742.000)	Naiknya harga gas	Umum
4	01	01	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100 persen	6 paket	Rp. 351.438.000	Rp.240.696.000	(110.742.000)	Naiknya harga gas	Umum

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
							Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4	01	01	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100 persen	17 Paket	Rp. 907.944.300	Rp. 970.728.700	62.784.400	Anggaran untuk penghias rumah tangga Setda dan Perwakilan masih kurang Banyaknya kegiatan setda sehingga harus menambah anggaran untuk makan dan minum jamuan tamu Banyaknya pergantian bola lampu dan penambahan stop kontak pada kantor perwakilan jakarta	Umum
4	01	01	2	13		Penataan Organisasi	Tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik Persentase pengelolaan tatalaksana Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik Persentase PD SAKIP bernilai Baik	Tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik Persentase pengelolaan tatalaksana Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik Persentase PD SAKIP bernilai Baik Persentase penataan organisasi	1,3 Skor/Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1,3 Skor/Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 1.196.694.700	Rp. 1.070.344.700	(126.350.000)		Organisasi
4	01	01	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase PD Kabupaten yang tepat fungsi dan ukuran Persentase Kebijakan bidang kelembagaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Persentase Kebijakan tentang Penataan SDM aparatur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	9 Dokumen	Rp. 142.020.100	Rp. 248.370.100	106.350.000		Organisasi

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
							Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4	01	01	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase kebijakan bidang tatalaksana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Persentase PD yang melaksanakan tata laksana sesuai dengan ketentuan. Persentase PD yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik. Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Proses Bisnis dan SOP Persentasi PD yang melakukan inovasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	6 Laporan	Rp. 185.670.400	Rp. 190.670.400	5.000.000		Organisasi
4	01	01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase PD menyampaikan dokumen PK sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase PD yang menyampaikan laporan kinerja instansi tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase PD yang menyampaikan laporan kinerja triwulanan tepat waktu Persentase PD yang menyampaikan laporan pengelolaan RB unit/PD tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase pengisian PMPRB unit/PD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	7 Dokumen	Rp. 869.004.200	Rp. 631.304.200	(237.700.000)		Organisasi
4	01	01	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi keprotokolkan kepada Pimpinan yang dilaksanakan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	Persentase Fasilitasi Keprotokolkan kepada Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 1.996.761.100	Rp. 2.222.973.100	226.212.000		Prokopim

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan	PENANGGUNG JAWAB
							Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	Perubahan Renja 2022	Jumlah Perubahan (+/-) Dalam Rp.		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11
4	01	01	2	14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi dan pengoordinasian acara yang dihadiri Pimpinan Persentase fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Persentase fasilitasi kunjungan kerja Pimpinan di dalam dan luar daerah Persentase fasilitasi penerimaan dan pengaturan kunjungan tamu daerah atau dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	12 Laporan	Rp. 1.529.863.000	Rp. 1.671.975.000	142.112.000	Meningkatnya mobilitas kegiatan KDH dan WKDH	Prokopim
4	01	01	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase penyiapan bahan sambutan/materi/pointer Pimpinan Persentase penyiapan ucapan selamat/duka, dan cinderamata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100 persen 100 persen	12 Laporan	Rp. 222.344.100	Rp. 222.344.100	0		Prokopim
4	01	01	2	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan Persentase publikasi kegiatan Pimpinan dan Sekretariat Daerah melalui website dan media sosial Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 persen 100 persen	12 Laporan	Rp. 244.554.000	Rp.328.654.000	84.100.000	Kalender Tahunan yang dibagikan ke setiap SKPD, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat sebagai media informasi kegiatan Pimpinan	Prokopim
4	1	2				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	3,1000 Nilai 100 Persen	3,1000 Nilai 100 Persen	Rp. 8.360.368.000	Rp. 8.188.979.000	(171.389.000)		
4	1	2	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	Rp.626.266.000	Rp. 621.621.000	(4.645.000)		Tapem

							Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat urusan Administrasi pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang ditindaklanjuti											
							Persentase Fasilitasi dan Koordinasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti		100 persen									
							Persentase Fasilitasi dan Koordinasi urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang ditindaklanjuti		100 persen									
4	1	2	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan	Persentase produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan	100 Persen	100 Persen	Rp. 364.864.200	Rp. 375.095.200	10.231.000				Hukum	
							Persentase Pengoreksian rancangan Produk Hukum Daerah	Persentase Pengoreksian rancangan Produk Hukum Daerah	100 Persen	100 Persen								
							Persentase penyelesaian bantuan hukum	Persentase penyelesaian bantuan hukum	100 Persen	100 Persen								
							Persentase pengoreksian contract drafting	Persentase pengoreksian contract drafting	100 Persen	100 Persen								
4	1	2	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase pengoreksian rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan yang telah dilakukan koreksi legal drafting, sinkronisasi dan harmonisasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 persen	550 Dokumen	Rp.91.479.400	Rp. 101.710.400	10.231.000				Hukum	
							Persentase penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang telah dilakukan koreksi legal drafting, sinkronisasi dan harmonisasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		100 persen									

						Persentase Raperda yang dilakukan fasilitasi pembulatan, pemantapan konsepsi dan pengharmonisasian dengan Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian pembentuk perundang-undangan		100 persen						
						Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang telah dilakukan fasilitasi atau Evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat		100 persen						
						Persentase Program Pembentukan Peraturan Daerah pada setiap tahun sesuai dengan analisis kebutuhan perda dan skala prioritas		100 persen						
						Persentase Naskah Akademik/ Keterangan Penjelasan dari Pemrakarsa yang dilakukan penyelarasan.		100 persen						
						Persentase Penyusunan Bahan Pembicaraan Tingkat I pada setiap Raperda, yang terdiri dari : 1. Penyampaian/Penjelasan Bupati terhadap Raperda; 2. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD/Pendapat Bupati;		100 persen						
						Persentase Pembahasan Raperda dengan DPRD sesuai dengan Propemperda dan jadwal yang telah ditetapkan		100 persen						
						Persentase Penyusunan Bahan Pembicaraan Tingkat II pada setiap Raperda, yang terdiri dari : 1.Rapat tindak lanjut hasil fasilitasi atau evaluasi; 2. Pengambilan Keputusan		100 persen						

4	1	2	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase penyusunan rancangan naskah perjanjian Persentase penyelesaian bantuan hukum yang tertangani Persentase Penyusunan Laporan Program Nasional terkait Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang terfasilitasi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100 persen 100 persen 100 persen	5 Kasus	Rp. 209.271.200	Rp.209.271.200	0		Hukum
4	1	2	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase registrasi produk hukum daerah Persentase dokumentasi produk hukum daerah Persentase Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan melalui website Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 persen 100 persen 100 persen	500 Dokumen	Rp. 64.113.600	Rp. 64.113.600	0		Hukum
4	1	2	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang ditindaklanjuti	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Rp. 25.558.800	Rp. 25.558.800	0		Tapem
4	1	2	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase koordinasi kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 25.558.800	Rp. 25.558.800	0		Tapem
4	1	3				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100 Persen 40 Skor/Nilai	100 Persen 40 Skor/Nilai	Rp. 1.480.065.100	Rp. 1.411.219.900	(68.845.200)		Ekonomi
4	1	3	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase fasilitasi kebijakan ekonomi Persentase fasilitasi kebijakan BUMD & BLUD Persentase fasilitasi kebijakan SDA	Persentase fasilitasi kebijakan ekonomi Persentase fasilitasi kebijakan BUMD & BLUD Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp.447.221.500	Rp. 317.496.500	(129.725.000)		Ekonomi

4	1	3	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan BUMD yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan BLUD yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100 Persen 100 Persen	12 Dokumen	Rp.378.407.800	Rp. 248.682.800	(129.725.000)		Ekonomi
4	1	3	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Kebijakan Perindustrian yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Perdagangan yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Koperasi yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Usaha Mikro yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Pariwisata yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	4 Laporan	Rp. 68.813.700	Rp. 68.813.700	0		Ekonomi
4	1	3	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Rp. 196.130.000	Rp. 187.009.800	(9.120.200)		Adpem
4	1	3	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase tersusunnya pendukung pembangunan dan kebijakan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100 persen	4 Dokumen	Rp. 28.780.700	Rp. 28.780.700	0		Adpem
4	1	3	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100 persen	4 Laporan	Rp. 30.937.900	Rp.21.817.700	(9.120.200)		Adpem
4	1	3	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase permasalahan pembangunan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	2 Laporan	Rp.136.411.400	Rp. 136.411.400	0		Adpem
4	1	3	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	20 Persen	20 Persen	Rp. 801.360.700	Rp. 871.360.700	(70.000.000)		PBJ
4	1	3	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan yang dibuat berdasarkan Laporan yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan persentase penyelesaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	5 Dokumen	Rp. 129.242.000	Rp. 129.242.000	0		PBJ

							paket e-purchasing pada katalog elektronik		100 persen							
							persentase penyelesaian paket pengadaan langsung melalui SPSE		100 persen							
							persentase penyelesaian paket Tender/Seleksi melalui SPSE		100 persen							
							Persentase SOP yang dibuat berdasarkan SOP yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan		100 persen							
4	1	3	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Sistem Informasi yang dikelola berdasarkan Sistem Informasi yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 persen	5 Dokumen	Rp.540.083.700	Rp. 610.083.700	70.000.000			PBJ
							persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SIRUP sesuai dengan anggaran SKPD		100 persen							
							Persentase Pemenuhan Std. LPSE berdasarkan Std. yang ditetapkan oleh LKPP		100 persen							
4	1	3	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas terhadap target jumlah pelaku pengadaan yg mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	68 orang	Rp. 132.035.000	Rp. 132.035.000	0			PBJ
							Jumlah variabel kematangan UKPBJ level proaktif		3 variabel							
4	1	3	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitas kebijakan SDA	Persentase fasilitas kebijakan SDA	100 Persen	100 Persen	Rp. 35.352.900	Rp. 35.352.900	0			Ekonomi
4	1	3	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentasi Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	100 Persen	2 Dokumen	Rp. 10.693.900	Rp. 10.693.900	0			Ekonomi
							Persentasi Kebijakan Perkebunan dan peternakan yang ditindaklanjuti	Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	100 Persen							
							Persentasi Kebijakan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti	Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	100 Persen							

							Persentasi Kebijakan Perikanan yang ditindaklanjuti		100 Persen						
							Persentasi Kebijakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti		100 Persen						
4	1	3	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase perhitungan pemakaian listrik dan air dalam kriteria efisien	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	100 persen	94 Dokumen	Rp. 24.659.000	Rp. 24.659.000	0		Ekonomi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan indikator pada level sub kegiatan, yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Perubahan anggaran pada Pagu awal Renja 2022 yang awalnya Rp.46.782.481.052 menjadi Rp.48.821.066.052. Adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 2.038.585.000.
3. Pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada penambahan pagu dari pagu awal sebesar Rp. 36.942.047.952., menjadi Rp. 39.220.867.152. Adanya penambahan pagu sebesar Rp. 2.278.819.200. Untuk alasan penambahan dapat dilihat pada tabel di atas.
4. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terjadi pengurangan pagu, dari pagu awal Rp. 8.360.368.000 menjadi Rp. 8.188.979.000. Adanya pengurangan pagu sebesar Rp. 171.389.000. Untuk alasan perubahan dapat dilihat pada tabel di atas.
5. Pada Program Perekonomian dan Pembangunan terjadi pengurangan pagu, dari pagu awal Rp.1.480.065.100 menjadi Rp. 1.411.219.900. Adanya pengurangan pagu sebesar Rp. 68.845.200. Untuk alasan perubahan dapat dilihat pada tabel di atas.
6. Perubahan anggaran yang terjadi pada sub kegiatan tidak dijabarkan lagi disini, karena alasan sudah disertakan pada tabel di atas.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 yang disusun oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul saat ini. Rencana kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 ini memberikan gambaran mengenai program kegiatan, sasaran, indikator kinerja, target, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

IV.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan atas kinerja tahunan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar bagian-bagian;
- Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022, adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
- Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah, di dalam proses

penyusunannya harus memperhatikan / menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar) ;

- Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

IV.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan antara lain perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2022, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum APBD 2022 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja 2022 yang disusun ini juga diharapkan dapat ditutup dengan capaian kinerja yang memuaskan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

Martapura, Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. H. Mokhamad Hilman, ST, MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19700328 199503 1 001